

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kredit perbankan memiliki peran penting di dalam perekonomian khususnya di Indonesia. Pemberian kredit difokuskan menjadi salah satu upaya di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit dapat memungkinkan bagi rumah tangga untuk melakukan konsumsi serta bagi perusahaan dalam investasi jika tidak bisa menggunakan dana pribadi. Kredit perbankan berfungsi untuk memperluas dan meningkatkan nilai guna dari produk sektor riil di Indonesia. Produk sektor riil dapat menunjang di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor riil memberikan banyak *benefit* terhadap jalannya perekonomian di Indonesia, dengan adanya *output* yang dihasilkan oleh sektor riil menambah penghasilan baik bagi rumah tangga, perusahaan serta negara. Hal tersebut didukung dengan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sektor riil dalam berproduksi.

Faktor-faktor itu antara lain adalah, sumber daya manusia, kondisi alam, dan keuangan. Sektor riil yang ada di Indonesia sangatlah beragam, salah satu faktor penghambat dari sektor riil di dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah

masalah keuangan atau permodalan. Masalah permodalan ini memang menjadi permasalahan bagi banyak sektor ekonomi di Indonesia, khususnya sektor riil.

Masalah permodalan atau keuangan ini menjadikan masyarakat atau pelaku ekonomi khususnya dalam sektor riil harus memikirkan jalan keluar agar dapat tetap mengembangkan sektor riil. Salah satu cara bagi pelaku ekonomi di dalam mengatasi masalah keuangan adalah dengan melakukan pinjaman. Lembaga keuangan di sini memiliki peran di dalam mengatasi salah satu permasalahan berkembangnya sektor riil.

Lembaga keuangan menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1967 pasal 1 butir b adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Jenis-jenis lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Dalam penelitian ini, penulis memilih BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sebagai salah satu lembaga keuangan bank, yang memiliki peran khusus atau memberikan fasilitas dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank, karena itu hasil pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik-baiknya, ketika bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), dana tersebut akan menjadi beban bagi bank atau lembaga keuangan apabila hanya dihimpun saja tanpa adanya aliran dalam dana tersebut. Untuk itu dana yang telah dihimpun dari depositan akan lebih baik apabila dialokasikan kepada masyarakat dengan cara pemberian kredit.

Pemberian kredit kepada masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat suku bunga dan inflasi. Tingkat suku bunga disini sebagai acuan bagi perbankan. Dengan semakin tingginya tingkat suku bunga khususnya *BI rate* akan mempengaruhi pemberian kredit kepada masyarakat.

Tingkat inflasi juga menjadi salah satu faktor perbankan dalam menyalurkan kredit. Krisis moneter tahun 2008 merupakan bukti nyata pengaruh penyaluran kredit bagi perekonomian. Pada saat krisis moneter 2008 inflasi meningkat tajam mulai bulan Juni hingga puncaknya di bulan September dari 11,03 % mencapai 12,14 % diikuti pula dengan *BI rate* yang meningkat juga dari bulan Juni hingga September dari 8,5 % mencapai 9,25 % (Bank Indonesia, 2016).



Sumber: Bank Indonesia (2016)

Gambar 1.1
Perkembangan Inflasi di Indonesia

Menurut Bank Indonesia (2008) Kualitas kredit tetap terpelihara baik, sebagaimana tercermin pada *Non Performing Loan (NPL)* tahun 2008, baik *gross* maupun *net*, yang berhasil mencatat angka terendah semenjak krisis keuangan Asia tahun 1997/1998 dan sekaligus berada jauh di bawah target indikatif yang

ditetapkan Bank Indonesia. Namun, ekspansi kredit yang lebih tinggi dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut terjadi di tengah ketatnya likuiditas global sehingga memengaruhi likuiditas antarbank. Meski secara industri likuiditas mencukupi, kecenderungan segmentasi antarbank yang meningkat sempat menjadikan likuiditas antarbank ketat. Rentabilitas bank cukup terjaga didukung kualitas kredit yang baik, meskipun suku bunga dana relatif meningkat.

Inflasi serta *BI rate* juga mempengaruhi peningkatan serta penurunan simpanan masyarakat dan penyaluran kredit oleh perbankan. Ketika laju inflasi meningkat dan susah dikendalikan hal tersebut menyebabkan usaha penghimpunan dana oleh bank dan penyaluran kredit menjadi tersendat.

Pendapatan bank akan menurun ketika penyaluran kredit tidak dilakukan dengan benar atau tersendat, karena sumber utama dari pendapatan bank adalah seberapa besar kredit yang disalurkan oleh bank. Dengan adanya kenaikan inflasi yang tinggi maka pemerintah akan mengatasinya dengan menaikkan *BI Rate* agar jumlah uang yang beredar dimasyarakat berkurang dan berakibat pada kenaikan suku bunga simpanan dan pinjaman (Astuti, 2013:48).

Selain *BI rate*, Resiko dalam pemberian kredit juga merupakan hal yang penting di dalam penyaluran kredit. Resiko itu menjadi tolak ukur bagi perbankan di dalam mengalokasikan dana deposit untuk kredit. Resiko perbankan di penelitian ini di ukur dengan melihat kinerja perbankan khususnya BPR. Kinerja perbankan ini di dasari oleh beberapa faktor. Menurut Ali (2004) faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai penilaian kinerja maupun laba yang diperoleh.

Seperti, DPK (Dana Pihak Ketiga), CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan NPL (*Non Performing Loan*) (Wijayanti, 2015:4).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dipinjamkan oleh deposan untuk diberikan ketika ada pengajuan kredit, CAR merupakan rasio yang mewakili permodalan, hal tersebut menunjukkan kemampuan dari bank di dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank, sedangkan NPL mencerminkan resiko kredit perbankan, semakin tinggi NPL maka semakin tinggi resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Wijayanti, 2015:4).

Dalam penelitian ini penulis memilih lembaga keuangan BPR khususnya di Jawa Tengah, hal tersebut dilatarbelakangi oleh pernyataan dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah dan Yogyakarta, Panca Hadi Suryatno. Menurut beliau BPR di Jawa Tengah merupakan BPR yang tergolong sehat dan relatif bekerja lebih baik. Berdasarkan data yang ada di OJK hingga semester satu tahun ini, jumlah BPR di Jawa Tengah mencapai 252 unit sedangkan BPR Syariah (BPRS) sebanyak 26 unit dengan jumlah aset sebesar Rp23,9 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp17,8 triliun, dan kredit sebesar Rp18,9 triliun. Secara *year on year* (y-o-y) atau tahunan ada pertumbuhan kinerja. Secara rincian, untuk aset tumbuh 16,14%, DPK tumbuh 18,94 %, dan kredit tumbuh 9,54 % (Sismanto, 2016).

Jika dibandingkan dengan Jawa Barat yang jumlah BPR-nya lebih banyak yaitu 292 bpr dan 29 BPRS, kinerja BPR/BPRS Jateng masih lebih baik. Untuk diketahui, pada periode yang sama total aset BPR/BPRS di Jawa Barat sebesar

Rp18,8 triliun, dana pihak ketiga Rp12,4 triliun, dan kredit sebesar Rp12,43 triliun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pertumbuhan kinerja juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan BPR/BPRS Jawa Tengah yaitu aset tumbuh 7,4 persen, dana pihak ketiga tumbuh 3,16 persen, dan kredit tumbuh 5,6 persen (Sismanto, 2016).

Jika dibandingkan juga dengan BPR di Jawa Timur yang jumlah BPR-nya lebih banyak daripada BPR di Jawa Tengah dengan jumlah 322 BPR dan 28 BPRS, kinerja BPR di Jawa Tengah masih lebih baik. Adapun dalam periode yang sama di Jawa Timur pertumbuhan aset, DPK dan kredit masing-masing sebesar Rp 14 triliun, Rp 8.9 triliun dan Rp 10,3 triliun (Sismanto, 2016). Secara rinci pada tabel 1.1 dapat dilihat perbandingan nilai aset, DPK dan kredit yang dimiliki oleh BPR di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Tabel 1.1
Nilai Aset, DPK dan kredit BPR

	Jawa Tengah	Jawa Barat	Jawa Timur
Jumlah BPR/S	252 + 26	292 + 29	322 + 28
Asset	Rp 23,9 Triliun	Rp 18,8 Triliun	Rp 14 Triliun
DPK	Rp 17,8 Triliun	Rp 12,4 Triliun	Rp 8,9 Triliun
Kredit	Rp 18,9 Triliun	Rp 12,43 Triliun	Rp 10,3 Triliun

Sumber : Sismanto (2016)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja BPR di Jawa Tengah lebih unggul dibandingkan BPR yang ada di daerah lainnya. Namun walaupun BPR di Jawa Tengah terbilang unggul, terdapat masalah di dalam pertumbuhan NPL. Menurut OJK BPR di Jawa Tengah mengalami peningkatan NPL yang seharusnya dibawah 5% namun pada akhir-akhir tahun 2016 meningkat

hingga 6,94% yang nilainya melebihi NPL BPR secara nasional. Akibat kredit bermasalah sebagian BPR terpaksa mengurangi ekspansi kredit. Pada tabel 1.2 ditunjukkan tingkat NPL BPR di Jawa Tengah yang melebihi angka 5% (Zuraya, 2016).

Tabel 1.2
Tingkat NPL BPR di Jawa Tengah

Bulan	NPL
Desember 2015	5,93%
Januari 2016	6,50%
Februari 2016	6,72%
Maret 2016	6,75%
April 2016	6,97%
Mei 2016	7,12%
Juni 2016	6,79%
Juli 2016	7,04%
Agustus 2016	6,99%
September 2016	7,14%
Oktober 2016	7,12%
November 2016	6,94%

Sumber : Bank Indonesia (2017)

Tingginya nilai NPL BPR di Jawa Tengah mengindikasikan bahwa resiko kredit yang diterima BPR di Jawa Tengah juga tinggi. Namun walaupun nilai NPL BPR di Jawa Tengah ini terbilang tinggi, nilai penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR di Jawa Tengah tetaplah tinggi.

Berdasarkan permasalahan BPR di Jawa Tengah, penulis ingin meneliti mengenai hubungan antara *BI Rate* dan kinerja BPR terhadap kredit yang disalurkan BPR di Jawa Tengah. Melihat kembali bahwa BPR di Jawa Tengah mengalami peningkatan NPL dan berdampak terhadap ekspansi kredit dan dibandingkan dengan BPR yang ada di wilayah lain nya, BPR di Jawa Tengah ini lebih unggul sehingga penulis ingin mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari *BI Rate*, CAR, NPL dan DPK terhadap kredit yang disalurkan BPR di Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh *BI Rate* terhadap penyaluran kredit khususnya BPR di Jawa Tengah?
- 2) Bagaimana pengaruh kinerja keuangan bank CAR dalam penyaluran kredit khususnya BPR di Jawa Tengah?
- 3) Bagaimana pengaruh kinerja keuangan bank NPL dalam penyaluran kredit khususnya BPR di Jawa Tengah?
- 4) Bagaimana pengaruh kinerja keuangan bank DPK dalam penyaluran kredit khususnya BPR di Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh BI *Rate* terhadap penyaluran kredit BPR di Jawa Tengah.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan bank CAR terhadap penyaluran kredit BPR di Jawa Tengah.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan bank NPL terhadap penyaluran kredit BPR di Jawa Tengah.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan bank DPK terhadap penyaluran kredit BPR di Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah disajikan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Perusahaan perbankan khususnya BPR, sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja, bahan evaluasi didalam mengambil keputusan serta kiat-kiat didalam mengembangkan penyaluran kredit.
- 2) Peneliti, sebagai upaya didalam menyalurkan teori yang telah dipelajari selama berada di bangku kuliah serta menyelesaikan salah satu syarat mengikuti skripsi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 3) Pembaca/peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik yang diambil oleh peneliti.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka latar belakang, maka hipotesis yang diajukan adalah:

- 1) Diduga BI *rate* dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit oleh BPR di Jawa Tengah
- 2) Diduga CAR dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit oleh BPR di Jawa Tengah
- 3) Diduga NPL dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit oleh BPR di Jawa Tengah
- 4) Diduga DPK dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit oleh BPR di Jawa Tengah

1.6. Sistematika Penulisan

Didalam penelitian ini disajikan rencana sistematika penulisan dari skripsi, yaitu:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Tinjauan Pustaka
Bab III	Metode Penelitian
Bab IV	Hasil dan Pembahasan
Bab V	Penutup